APAKAH DIREKSI WANITA DAN KOMITE AUDIT MENGURANGI AGRESIVITAS PAJAK? ANALISIS MODERASI DENGAN KONEKSI POLITIK
(Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2021)

Muh. Anugerah Maulana[1], Ananto Prabowo[2]
muh.anugerah@student.tau.ac.id[1], ananto.prabowo@gmail.com[2]
Tanri Abeng University

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Direksi Wanita dan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak yang dimoderasi oleh Koneksi Politik. Menggunakan sampel sebanyak 25 perusahaan BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2021 dengan total data sampel sebanyak 653. Pengolahan analisa data pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi Gretl dan R-Studio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Direksi Wanita berpengaruh negative signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Moderasi oleh Koneksi Politik mengubah arah interaksi Direksi Wanita terhadap Agresivitas pajak yang semula positif menjadi negative signifikan. Komite Audit menunjukkan hasil yang positif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak dan berubah menjadi negatif tidak signifikan setelah dimoderasi oleh Koneksi Politik. Hal ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan memiliki koneksi politik, maka perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan aktivitas akuntansi yang agresif termasuk kebijakan perpajakan. Tetapi, karena sifat wanita yang memiliki tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap peraturan yang tinggi membuat direksi wanita akan lebih terawasi dan kurang berkenan melakukan agresivitas pajak ketika memiliki koneksi politik.
Kata Kunci: Keberagaman Gender Direksi, Komite Audit, Koneksi Politik, Agresivitas Pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the relationship between Board Gender Diversity and Audit Committee on Tax Aggressiveness moderated by Political Connection. Using a sample of 25 state-owned companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2014 – 2021 with a total sample data of 653. Data analysis processing in this study used the Gretl and R-Studio application. The results of this study indicate that the Board Gender Diversity has a significant negative effect on Tax Aggressiveness. Moderation by Political Connection changed the direction of the interaction of the Board Gender Diversity towards Tax Aggressiveness which was originally positive to become negatively significant. The moderation effect of Political Connections changes the direction of interaction that was initially positive to negative. This shows that when a company has political connections, the company has a greater opportunity to carry out aggressive accounting activities including tax policies. However, due to the nature of women who have social responsibility and high compliance with regulations, female directors will be more supervised and less willing to carry out tax aggressiveness when they have political connections.
Keywords: *Board Gender Diversity, Audit Committee, Political Connection, Tax Aggressiveness.*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan komponen utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Pada tahun 2021, kontribusi pajak terhadap total penerimaan negara mencapai 79,38%, menjadikannya sumber pendanaan negara paling dominan dibandingkan penerimaan negara bukan pajak (20,61%) dan hibah (0,15%) (BPS, 2022). Meskipun demikian, tax ratio Indonesia tercatat masih rendah, yaitu sebesar 9,11% pada 2021, jauh dari standar ideal yang diharapkan oleh pemerintah dan lebih rendah

dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya (Kemenkeu, 2022). Rendahnya tax ratio mengindikasikan adanya masalah dalam sistem perpajakan nasional, termasuk tingginya praktik agresivitas pajak oleh entitas bisnis. Agresivitas pajak didefinisikan sebagai strategi legal maupun ilegal untuk meminimalisasi kewajiban pajak melalui perencanaan pajak yang kompleks dan sering kali mengeksploitasi celah dalam peraturan perpajakan (Deslandes et al., 2020; Garcia-Blandon et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, sistem self-assessment memberikan ruang bagi wajib pajak, khususnya korporasi, untuk melakukan optimalisasi beban pajak melalui strategi tertentu, termasuk yang bersifat agresif.

Dewan direksi, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, memainkan peran sentral dalam menentukan arah kebijakan perpajakan perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa keberadaan direksi wanita dalam jajaran direksi dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Direksi wanita dinilai memiliki tingkat kepatuhan, integritas, dan kehati-hatian yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga diasumsikan dapat menekan praktik agresivitas pajak (Garcia-Blandon et al., 2022; Pucheta-Martínez et al., 2018).

Selain dewan direksi, peran komite audit sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan juga penting dalam mengawasi kebijakan perpajakan. Komite audit yang independen dan memiliki keahlian yang memadai diyakini dapat menurunkan tingkat manipulasi pelaporan pajak (Deslandes et al., 2019; al Farooque et al., 2019). Namun demikian, beberapa studi lain menunjukkan hasil yang kontradiktif, di mana kehadiran komite audit tidak selalu signifikan dalam membatasi agresivitas pajak (Kamul & Riswandari, 2021).

Salah satu variabel kontekstual yang patut diperhatikan dalam dinamika agresivitas pajak adalah koneksi politik. Perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan politisi atau pejabat publik diduga memiliki akses terhadap informasi eksklusif, proteksi hukum, dan keleluasaan dalam pengambilan keputusan strategis (Khlif & Amara, 2019; Kim & Zhang, 2016). Dalam konteks Indonesia, hubungan politik perusahaan kerap diasosiasikan dengan kemudahan memperoleh kontrak pemerintah, pembatalan sanksi pajak, hingga penangguhan kewajiban pajak. Fenomena ini mengindikasikan bahwa koneksi politik dapat berfungsi sebagai katalisator yang memperkuat atau melemahkan hubungan antara struktur tata kelola dan agresivitas pajak.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh direksi wanita dan komite audit terhadap agresivitas pajak, serta peran koneksi politik sebagai variabel moderasi dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014–2021. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola perusahaan dan formulasi kebijakan fiskal yang lebih adil dan akuntabel.

Tinjauan Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Penelitian ini berakar pada teori keagenan (agency theory) yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer). Dalam konteks ini, manajer memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitas pribadinya, yang dapat merugikan pemegang saham. Salah satu bentuk konflik ini terwujud dalam keputusan perpajakan yang agresif, di mana manajemen dapat mengambil risiko hukum dan reputasi demi efisiensi pajak jangka pendek (Deslandes et al., 2019; Madah Marzuki & Syukur, 2021). Dalam skema ini, keberadaan mekanisme pengawasan seperti direksi wanita dan komite audit diasumsikan dapat mengurangi konflik keagenan melalui penguatan kontrol dan pengambilan keputusan

yang etis. Di sisi lain, koneksi politik dapat melemahkan sistem pengawasan tersebut karena adanya tekanan atau konflik kepentingan yang bersifat eksternal terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.

2. Agresivitas Pajak

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah legal dalam regulasi perpajakan (Hoseini et al., 2019). Strategi ini dapat mencakup investasi tertentu atau penggunaan instrumen keuangan yang bertujuan untuk menurunkan kewajiban pajak yang dilaporkan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan penting antara perencanaan pajak yang wajar dan strategi yang dikategorikan sebagai agresivitas pajak. Canada Revenue Agency (CRA, 2022) menekankan bahwa perencanaan pajak yang terlalu agresif dapat menimbulkan risiko hukum karena dapat melampaui batas kepatutan dan menjadi tindakan abusif. Dalam kerangka ini, agresivitas pajak mencakup praktik legal maupun ilegal yang digunakan untuk menekan beban pajak secara signifikan, serta dapat mencerminkan efisiensi atau manipulasi dalam pengelolaan pajak perusahaan (Garcia-Blandon et al., 2022).

Faktor internal, seperti karakteristik eksekutif perusahaan, berperan penting dalam menentukan tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Eksekutif bertipe risk taker lebih cenderung mengadopsi strategi perpajakan yang agresif karena memiliki orientasi pada pencapaian kinerja tinggi, peningkatan posisi, serta keuntungan jangka pendek yang maksimal (Septiawan et al., 2021). Sebaliknya, eksekutif risk averse lebih memilih kebijakan konservatif dengan risiko minimal, sekalipun berpotensi menghasilkan beban pajak yang lebih besar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa preferensi risiko manajerial menjadi determinan penting dalam kebijakan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap profil kepemimpinan dan orientasi risiko menjadi aspek krusial dalam menginterpretasikan variasi praktik penghindaran pajak antar entitas.

3. Direksi Wanita dan Agresivitas Pajak

Sejumlah penelitian menyatakan bahwa keberadaan direksi wanita dalam dewan direksi memiliki efek penurunan terhadap praktik agresivitas pajak. Direksi wanita dianggap lebih berhati-hati dalam mengambil risiko, menjunjung tinggi etika, dan memiliki tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Garcia-Blandon et al., 2022; Pucheta-Martínez et al., 2018). Studi oleh Jbir et al. (2021) dan Kamul & Riswandari (2021) juga mendukung bahwa perempuan dalam posisi pengambilan keputusan strategis mampu mengurangi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran atau manipulasi pajak. Berdasarkan penjelasan teori dan perbedaan hasil tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Direksi Wanita berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

4. Komite Audit dan Agresivitas Pajak

Komite audit memainkan peran penting dalam mengawasi pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perpajakan. Komite yang independen dan memiliki keahlian akuntansi yang memadai dapat menjadi penghalang utama terhadap praktik pelaporan pajak yang agresif (Deslandes et al., 2019). Namun, hasil studi masih beragam. Sebagian studi menemukan bahwa ukuran atau keberadaan komite audit tidak selalu signifikan dalam mengurangi agresivitas pajak (Kamul & Riswandari, 2021), terutama jika kualitas pengawasan lemah atau terdapat tekanan internal. Berdasarkan penjelasan teori dan perbedaan hasil tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

5. Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi

Koneksi politik dalam perusahaan mengacu pada keterkaitan langsung atau tidak langsung manajemen dengan pejabat publik atau partai politik. Dalam literatur, koneksi

politik dipandang sebagai bentuk "aset tak berwujud" yang dapat digunakan untuk memperoleh perlindungan hukum, akses informasi, dan toleransi regulatif (Khlif & Amara, 2019; Kim & Zhang, 2016). Dalam konteks perpajakan, koneksi politik dapat memberikan ruang lebih besar bagi perusahaan untuk melaksanakan strategi agresif tanpa ancaman penalti tinggi. Namun, kehadiran direksi wanita yang etis dan komite audit yang kuat dapat mengubah arah hubungan ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3a: Koneksi Politik akan Memoderasi Hubungan yang Positif antara Keberagaman Gender Direksi dan Agresivitas Pajak.

H3b: Koneksi Politik akan Memoderasi Hubungan yang Positif antara Komite Audit dan Agresivitas Pajak.

METODOLOGI

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal-komparatif untuk menguji hubungan antara variabel independen (direksi wanita dan komite audit), variabel moderasi (koneksi politik), dan variabel dependen (agresivitas pajak). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan fixed effect model, mengingat karakteristik data yang bersifat time-series cross-sectional.

2. Model Penelitian

Dalam rangka melihat bagaimana pengaruh keberagaman gender direksi dan komite audit terhadap agresivitas pajak. Serta bagaimana koneksi politik yang dimiliki perusahaan dapat memoderasi hubungan dari variabel-variabel tersebut, maka dibentuklah model-model yang diharapkan dapat menggambarkan hubungan tersebut. Model-model penelitian adalah sebagai berikut:

$$TaxAggr = \beta_0 + \beta_1 BGD + \beta_2 AC + \beta_3 ROA + \beta_4 SIZE + \beta_5 LEV + \varepsilon_i \quad (1)$$

$$TaxAggr = \beta_0 + \beta_1 BGD + \beta_2 POL + \beta_3 BGD*POL + \beta_4 ROA + \beta_5 SIZE + \beta_6 LEV + \varepsilon_i \quad (2)$$

3. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum terhadap karakteristik data melalui nilai mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, dengan pengujian asumsi klasik yang mencakup uji multikolinieritas (tolerance > 0,10 dan VIF < 10), autokorelasi (Durbin-Watson dalam rentang du < DW < 4–du), heteroskedastisitas (melalui uji Breusch-Pagan dan White), dan normalitas residual (uji Kolmogorov-Smirnov).

Pengujian hipotesis dilakukan melalui:

- Uji t untuk melihat pengaruh signifikan parsial ($\alpha = 0{,}025$),
- Uji F untuk menguji pengaruh simultan variabel independen ($\alpha = 0{,}05$),
- Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model.

Jika model tidak memenuhi asumsi BLUE, maka digunakan metode FGLS (Feasible Generalized Least Squares) untuk mengatasi autokorelasi dan heteroskedastisitas, sebagaimana disarankan oleh Driscoll & Kraay (1998) dan Hoechle (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Sampel

Penelitian ini menganalisis 25 perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2014–2021 dengan total 654 observasi. Data bersumber dari laporan keuangan yang tersedia secara publik melalui situs resmi BEI dan masing-masing perusahaan.

2. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Median	S.D.	Min	Max
CFETR	654	0.3400	0.02648	5.515	-5.656	136.4
BGD	654	0.1917	0.1667	0.07979	0.000	0.600
AC	654	0.2870	0.2500	0.06864	0.1429	0.6667
POL	654	0.4409	0.4000	0.1725	0.1429	0.8571
ROA	654	0.01887	0.01367	0.01863	-0.0008	0.1730
SIZE	654	3.89e+13	1.863e+13	4.922e+13	1.066e+12	2.77e+14
LnSIZE	654	30.62	30.55	30.55	27.70	33.26
LEV	654	0.1694	0.1482	0.1292	2.050e-05	1.108

Sumber: Data diolah dengan Gretl

Rata-rata nilai Cash Flow ETR (CFETR) sebesar 34% menunjukkan bahwa secara umum perusahaan BUMN memiliki kecenderungan agresif dalam pajak, melebihi tarif PPh Badan rata-rata (24,4%) selama periode observasi. Proporsi direksi wanita rata-rata 19,17% dan komite audit independen sebesar 28,7%, masih berada di bawah ketentuan OJK (33,33%). Variabel kontrol menunjukkan rata-rata ROA sebesar 1,88%, leverage 16,94%, dan nilai aset (SIZE) sekitar Rp 38,9 triliun.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Test for null hypothesis of normal distribution:
Chi-square(2) = 248174.386 with p-value 0.00000
Chi-square(2) = 248040.201 with p-value 0.00000
Chi-square(2) = 248333.819 with p-value 0.00000

Sumber: data diolah dengan Gretl

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

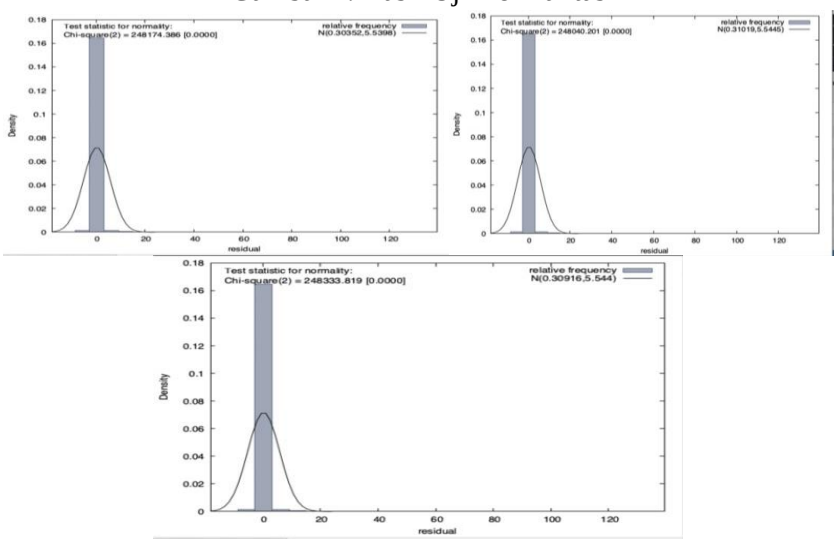

Sumber: data diolah dengan Gretl

Hasil uji Jarque-Bera pada ketiga model menunjukkan nilai Chi-square masing-masing sebesar 248174.386, 248040.201, dan 248333.819 dengan p-value < 0,05, yang menandakan residual tidak berdistribusi normal. Namun, mengacu pada Central Limit Theorem (CLT) (Gujarati, 2013; Wooldridge, 2018), asumsi normalitas dapat diabaikan ketika jumlah observasi besar (n > 100), karena OLS tetap memenuhi distribusi normal secara asimtotik. Hal ini juga didukung oleh Nevitt dan Hancock (2001) yang menyatakan bahwa dengan jumlah sampel > 250, pelanggaran terhadap asumsi normalitas tidak akan berdampak signifikan terhadap estimasi model. Dengan jumlah observasi sebanyak 654, model dalam penelitian ini tetap layak digunakan meskipun data tidak normal secara statistik.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Correlation Matrix Test & Variance Inflation Factors

	CFETR	**BGD**	**AC**	**POL**	**ROA**	**SIZE**	**LEV**	**VIF**
CFETR	1.000							1.002
BGD	-0.0059	1.000						1.055
AC	-0.0442	0.1926	1.000					1.432
POL	-0.0049	-0.1388	-0.1591	1.000				1.286
ROA	0.0253	-0.0174	-0.2002	-0.056	1.000			1.109
SIZE	0.0141	-0.1457	-0.5004	0.4229	0.0543	1.000		1.800
LEV	-0.0113	-0.0163	-0.1044	0.3406	-0.210	0.4158	1.000	1.352

Sumber: Data diolah dengan Gretl

Berdasarkan hasil Pearson Correlation Matrix dan nilai Variance Inflation Factor (VIF), seluruh korelasi antar variabel independen berada di bawah ambang batas 0,80 dan nilai VIF < 10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model. Dengan demikian, model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi bebas multikolinearitas dan layak untuk dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. White's Test

Model 1	p-value = P(Chi-square(20) > 4.241215) = 0.999925
Model 2	p-value = P(Chi-square(26) > 4.115447) = 1.000000
Model 3	p-value = P(Chi-square(26) > 5.103578) = 0.999997

Sumber: data diolah dengan Gretl

Tabel 5. Breusch-Pagan Test

Model 1	BP = 1.2718, df = 5, p-value = 0.9378
Model 2	BP = 1.2834, df = 6, p-value = 0.9726
Model 3	BP = 1.5302, df = 6, p-value = 0.9575

Sumber: data diolah dengan R-Studio

Hasil uji White dan Breusch-Pagan menunjukkan bahwa seluruh p-value > 0,05, dengan demikian, model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi varian residual yang konstan (homoskedastisitas).

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Durbin Watson

Model 1	p-value = 1.989324
Model 2	p-value = 1.990397
Model 3	p-value = 1.991420

Sumber: data diolah dengan Gretl

Tabel 7. Wooldridge

Wooldridge test for autocorrelation
p-value = P(|t| > 1.79017) = 0.0860523
p-value = P(|t| > 1.85887) = 0.0753507
p-value = P(|t| > 1.80884) = 0.0830215

Sumber: data diolah dengan Gretl

Nilai Durbin-Watson mendekati 2, namun p-value Wooldridge test < 0,10 mengindikasikan adanya autokorelasi dalam model. Oleh karena itu, model ini tidak sepenuhnya memenuhi asumsi klasik dan diperlukan pendekatan estimasi alternatif.

Tabel 8. Summary of Panel Regression Assumption Test

	Model 1	**Model 2**	**Model 3**
Jarque- Bera Test *(P-Value)*	248174.386	248040.201	248333.819
Breusch-Pagan Test *(P-Value)*	0.9378***	0.9726***	0.9575***
White's Test *(Chi Square)*	4.241215	4.115447	5.103578
Durbin Watson *(P-Value)*	1.989324	1.990397	1.991420
Wooldridge Test *(t-statistics)*	1.79017***	1.85887***	1.80884***

Keterangan: *;**;*** menyatakan signifikansi 1%, 5%, dan 10%.

Sumber: data diolah dengan Gretl dan R-Studio

4. Hasil Regresi

Tabel 9. Hasil Uji Regresi

Variabel	***Cash Flow ETR (CFETR)***					
	Model 1		**Model 2**		**Model 3**	
BGD	−1.308	0.023**	0.503	0.209		
AC	1.687	0.130			−0.010	0.973
POL			0.337	0.011**	0.142	0.316
POL*BGD			−1.325	0.066*		
POL*AC					−0.215	0.714
ROA	11.435	1.08e-05***	2.861	6.32e-07***	2.358	5.85e-05***
SIZE	−0.010	0.845	−0.002	0.792	−0.005	0.584
LEV	0.789	0.138	0.167	0.105	0.187	0.072*
P value(F)		0.021636		0.009205		0.012689
R^2		0.020138		0.025926		0.015641
Adj R^2		0.012566		0.016879		0.016946

Keterangan: *;**;*** menyatakan signifikansi 1%, 5%, dan 10%.

Sumber: Data diolah dengan Gretl

Nilai R^2 berkisar antara 1,5% hingga 2,5%, menunjukkan variabel independen memiliki kemampuan prediksi rendah terhadap agresivitas pajak. Meski demikian, seluruh model signifikan secara simultan ($p < 0.05$), menandakan model valid untuk pengujian hipotesis.

Pengaruh Direksi Wanita terhadap Agresivitas Pajak

Model 1 menunjukkan bahwa proporsi direksi wanita berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak ($\beta = -1.308$; $p = 0.023$). Temuan ini mendukung studi Chen et al. (2019), yang menyatakan bahwa kehadiran perempuan dalam dewan direksi memperkuat kepatuhan etis dan menurunkan kecenderungan strategi pajak agresif. Dari sudut pandang teori agensi, hal ini mencerminkan peran pengawasan direksi wanita dalam mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas keputusan perpajakan.

Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Hasil regresi pada Model 1 menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak ($p = 0.130$). Meskipun tidak signifikan secara statistik, koefisien positif ($\beta = 1.687$) mengindikasikan kemungkinan bahwa komite audit belum berfungsi optimal sebagai mekanisme kontrol terhadap kebijakan perpajakan, sejalan dengan temuan García-Meca et al. (2021). Hal ini dapat dipengaruhi oleh kualitas, independensi, atau kapasitas teknis dari komite yang bersangkutan.

Efek Moderasi Koneksi Politik

Hasil pengujian interaksi menunjukkan bahwa koneksi politik memoderasi pengaruh direksi wanita terhadap agresivitas pajak secara signifikan negatif ($\beta = -1.325$; $p = 0.066$). Sementara itu, interaksi antara koneksi politik dan komite audit tidak signifikan ($p = 0.714$). Temuan ini memperkuat literatur Khlif & Amara (2019) yang menyatakan bahwa koneksi politik dapat menurunkan risiko deteksi pajak dan mendorong perilaku oportunistik. Namun, dalam konteks ini, kehadiran direksi wanita justru memperkuat kehati-hatian dan pengawasan internal meski berada dalam lingkungan yang rentan terhadap privilege politik.

Pengaruh Variabel Kontrol (ROA, SIZE, dan Leverage)

Variabel ROA konsisten menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak di seluruh model, yang berarti semakin tinggi profitabilitas, semakin besar insentif perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak. Leverage signifikan pada Model 3, menunjukkan bahwa pembiayaan eksternal juga mendorong perencanaan pajak agresif. Sebaliknya, SIZE tidak signifikan, mengindikasikan bahwa skala aset perusahaan tidak memiliki kontribusi berarti terhadap variasi strategi pajak yang diterapkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keberadaan direksi wanita dan komite audit terhadap agresivitas pajak pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014–2021, serta untuk menganalisis peran koneksi politik sebagai variabel moderasi. Berdasarkan analisis regresi data panel, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Direksi wanita berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya, semakin tinggi proporsi perempuan dalam jajaran direksi, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif. Hasil ini menunjukkan bahwa karakteristik kepemimpinan wanita yang cenderung lebih etis dan patuh terhadap regulasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap tata kelola perusahaan.
2. Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit pada BUMN belum mampu berfungsi secara efektif dalam mengontrol kebijakan pajak perusahaan, khususnya dalam konteks perencanaan pajak yang kompleks.

3. Koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki koneksi dengan aktor politik cenderung lebih agresif dalam memanfaatkan celah perpajakan, karena merasa memiliki perlindungan atau akses terhadap otoritas fiskal.
4. Interaksi antara direksi wanita dan koneksi politik menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa direksi wanita tetap menunjukkan etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi meskipun berada dalam konteks perusahaan yang memiliki koneksi politik.
5. Interaksi antara komite audit dan koneksi politik tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan komite audit dapat terkompromi oleh tekanan atau pengaruh politik.

Penelitian ini memperkuat teori keagenan dalam konteks perusahaan milik negara di negara berkembang, serta menambah bukti empiris bahwa variabel struktural seperti gender direksi dapat memitigasi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik modal. Temuan ini juga memperkaya literatur mengenai interaksi antara tata kelola perusahaan dan konteks politik.

DAFTAR PUSTAKA

Al Farooque, O., Buachoom, W., & Sun, L. (2019). Board, audit committee, ownership and financial performance – emerging trends from Thailand. Pacific Accounting Review, 32(1), 54–81. https://doi.org/10.1108/PAR-10-2018-0079

Aldhamari, R., Mohamad Nor, M. N., Boudiab, M., & Mas'ud, A. (2020). The impact of political connection and risk committee on corporate financial performance: evidence from financial firms in Malaysia. Corporate Governance (Bingley), 20(7), 1281–1305. https://doi.org/10.1108/CG-04-2020-0122

Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. Journal of Financial Reporting and Accounting, 18(4), 795–812. https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001

Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2019). PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS, GENDER DIVERSITY PADA DEWAN, DAN KUALITAS AUDITOR EKSTERNAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. Jurnal Ilmiah Akuntani, XVII(2), 142–157. http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/

Ariyani, P., Lestari, S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 11(1), 41–54. https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772

Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital IntensityTerhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara, 1(2). https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905

Badan Pusat Statistik. (2022). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022. Bps.Go.Id. https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan- negara.html

Badan Pusat Statistik. (2023). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023. Bps.Go,Id.

Bird, B. (2002). A Gendered Perspective on Organizational Creation. Entrepreneurship: Theory and Practice , 26(3), 41–65.

Canada Revenue Agency (CRA). (2022, December 23). Aggressive tax planning. Canada.Ca. https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/about-canada- revenue-agency-cra/tax-alert/aggressive-tax-planning.html

Chen, L. H., Gramlich, J., & Houser, K. A. (2019). The effects of board gender diversity on a firm's risk strategies. Accounting and Finance, 59(2), 991–1031. https://doi.org/10.1111/acfi.12283

Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2019). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. Managerial Auditing Journal, 35(2), 272–293. https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109

Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2020a). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. Managerial Auditing Journal, 35(2), 272–293. https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109

Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2020b). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. Managerial Auditing Journal, 35(2), 272–293. https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109

Ely, R. J., & Thomas, D. A. (2001). Cultural diversity at work: The effects of diversity perspectives on work group processes and outcomes. In Administrative Science Quarterly (Vol. 46, Issue 2, pp. 229–273). Johnson School at Cornell University. https://doi.org/10.2307/2667087

Erle, B. (2008). Tax Risk Management and Board Responsibility (S. Wolfgang, Ed.). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-540- 77276-7_15

Freeman, R. E., & McVea, J. (1984). A Stakeholder Approach to Strategic Management. https://doi.org/10.2139/ssrn.263511

Garcia-Blandon, J., Argilés-Bosch, J. M., Ravenda, D., & Castillo-Merino, D. (2022a). Board gender quotas, female directors and corporate tax aggressiveness: A causal approach. International Review of Financial Analysis, 79. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.102010

Garcia-Blandon, J., Argilés-Bosch, J. M., Ravenda, D., & Castillo-Merino, D. (2022b). Board gender quotas, female directors and corporate tax aggressiveness: A causal approach. International Review of Financial Analysis, 79. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.102010

García-Meca, E., Ramón-Llorens, M.-C., & Martínez-Ferrero, J. (2021). Are narcissistic CEOs more tax aggressive? The moderating role of internal audit committees. Journal of Business Research, 129, 223–235. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.043

Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. Source: The Academy of Management Review, 9(2), 193–206. https://doi.org/10.2307/258434

Heri, A. (2019). APBN dan APBD. Sumber.Belajar.Kemdikbud.Go.Id. https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/APBN%20dan%20APB D-BB/index.html

Hermawan, I. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Method (C. S. Rahayu, Ed.; 1st ed.). Hidayatul Quran Kuningan.

Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 22(1). https://doi.org/10.20885/jaai.vol2

Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. International Journal of Social Economics, 46(2), 199–212. https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507

Jarboui, A., Kachouri Ben Saad, M., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference? Journal of Financial Crime, 27(4), 1389–1408. https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122

Jbir, S., Neifar, S., & Makni Fourati, Y. (2021). CEO compensation, CEO attributes and tax aggressiveness: evidence from French firms listed on the CAC 40. Journal of Financial Crime, 28(4), 1141–1160. https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0202

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. Journal of

Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304- 405X(76)90026-X

Joni, J., Ahmed, K., & Hamilton, J. (2020). Politically connected boards, family and business group affiliations, and cost of capital: Evidence from Indonesia. British Accounting Review, 52(3). https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.100878

Kamul, I., & Riswandari, E. (2021). Pengaruh Gender Diversity Dewan, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 4(2). http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI

Khlif, H., & Amara, I. (2019). Political connections, corruption and tax evasion: a cross- country

investigation. Journal of Financial Crime, 26(2), 401–411. https://doi.org/10.1108/JFC-01-2018-0004
Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. Contemporary Accounting Research, 33(1), 78–114. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150
Kurniati, D. (2022a, January 3). Penerimaan PPh Badan Tumbuh 25,6% Sepanjang 2021. News.Ddtc.Co.Id. https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pph-badan-tumbuh-256- sepanjang-2021-35801
Kurniati, D. (2022b, February 6). Tarif PPh Badan Tetap 22%, Sri Mulyani: Untuk Jaga Tax Ratio. News.Ddtc.Co.Id. https://news.ddtc.co.id/tarif-pph-badan-tetap-22-sri- mulyani-untuk-jaga-tax-ratio-36684
Kurniati, D. (2022c, March 16). Bagaimana Tren Tax Ratio Indonesia dalam Satu Dekade Terakhir? News.Ddtc.Co.Id. https://news.ddtc.co.id/bagaimana-tren-tax-ratio- indonesia-dalam-satu-dekade-terakhir-37652
Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 11(1), 41–54. https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772
Leuz, C., & Oberholzer-Gee, F. (2006). Political relationships, global financing, and corporate transparency: Evidence from Indonesia. Journal of Financial Economics, 81(2), 411–439. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.06.006
Madah Marzuki, M., & Syukur, M. S. (2021). The effect of audit fees, audit quality and board ownership on tax aggressiveness: evidence from Thailand. Asian Review of Accounting. https://doi.org/10.1108/ARA-11-2020-0179
Mulachela, H. (2021, August 23). Bukan Hanya Pajak, Ini Jenis Sumber Pendapatan Negara. Katadata.Co.Id. https://katadata.co.id/muchamadnafi/finansial/612378e27850c/bukan-hanya-pajak- ini-jenis-sumber-pendapatan-negara
Ortas, E., & Gallego-Álvarez, I. (2020). Bridging the gap between corporate social responsibility performance and tax aggressiveness: The moderating role of national culture. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 33(4), 825–855. https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2017-2896
Prayanka, A., & Yolandha, F. (2020, October 12). Kemenkeu: Rasio Pajak Rendah akan Timbulkan Risiko Fiskal. Republika.Co.Id. https://www.republika.co.id/berita/qi2vkm370/kemenkeu-rasio-pajak-rendah-akan timbulkan-risiko-fiskal
Pucheta-Martínez, M. C., Bel-Oms, I., & Olcina-Sempere, G. (2018). The association between board gender diversity and financial reporting quality, corporate performance and corporate social responsibility disclosure: A literature review. In Academia Revista Latinoamericana de Administracion (Vol. 31, Issue 1, pp. 177– 194). Emerald Group Publishing Ltd. https://doi.org/10.1108/ARLA-04-2017-0110
Purwoto, L. (2011). Pengaruh koneksi politis, kepemilikan pemerintah, dan keburaman laporan keuangan terhadap kesinkronan dan risiko crash harga saham. Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen.
Putri, A. A., & Hanif, R. A. (2020). PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 1(3), 384–401. https://current.ejournal.unri.ac.id
Putri, C. A. (2021, June 28). Sri Mulyani Ungkap Rendahnya Tax Ratio Indonesia Sejak 1998. Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210628124633-4 256466/sri-mulyani- ungkap-rendahnya-tax-ratio-indonesia-sejak-1998
Putri, R. S., & Rosana, F. C. (2022, June 25). Kemenkeu Akui Rasio Pajak RI Lebih Rendah Ketimbang Negara Lain. Bisnis.Tempo.Co. https://bisnis.tempo.co/read/1615735/kemenkeu-akui-rasio-pajak-ri-lebih-rendah-ketimbang-negara-lain
Putri, V. R. (2018). Keterkaitan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan, 4(1),

20–28.
Riswandari, E., & Bagaskara, K. (2020). AGRESIVITAS PAJAK YANG DIPENGARUHI OLEH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KONEKSI POLITIK, PERTUMBUHAN PENJUALAN, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS. Jurnal Akuntansi, 10(3), 261–274. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.3.261-274
Saputra, F. (2022). Analysis Effect Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) and Price Earning Ratio (PER) on Stock Prices of Coal Companies in the Indonesia Stock Exchange (IDX) Period 2018-2021. Dinasti International Journal of Economics, Finance and Accounting (DIJEFA), 3(1), 82–94. https://doi.org/10.38035/dijefa.v3i1
Septiawan, K., Ahmar, N., & Darminto, D. P. (2021). AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA & REFLEKSI PERILAKU OPORTUNIS MELALUI MANAJEMEN LABA. Penerbit NEM.
Siciliya, A. R. (2020). INTENSITAS PERSEDIAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN AGRESIVITAS PAJAK: KONEKSI POLITIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Jurnal Literasi Akuntansi, 28–39.
Sukmana, Y. (2022, July 26). "Tax Ratio" Indonesia Ada di Bawah Rata-rata Negara Asia Pasifik. Money.Kompas.Com.
Sumingtio, A., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2022). Dapatkah Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Memoderasi Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak? E-Jurnal Akuntansi, 32(2), 3651–3668. https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v
Tanujaya, K., & Anggreany, E. (2021). Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender dan Kinerja Berkelanjutan terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(5).
Tinggi, S., Ekonomi, I., Sibolga, A.-W., Jurnali, T., Akuntansi, M. P., Bisnis, F., & Manajemen, D. (2022). PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP HUBUNGAN DIREKTUR WANITA DENGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 5(2). https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.7882
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).
Wareza, M. (2021, January 4). Ada Sengketa Pajak Rp 6,88 T, Saham PGN Diobral & Ambles. Cnbcindonesia.Com.https://www.cnbcindonesia.com/market/20210104144333-17-213354/ada- sengketa-pajak-rp-688-t-saham-pgn-diobral-ambles
Zirgulis, A., Huettinger, M., & Misiunas, D. (2022). No woman, no aggressive tax planning? A study on CEO gender and effective tax rates in the Lithuanian retail sector. Review of Behavioral Finance, 14(3), 394–409. https://doi.org/10.1108/RBF-09-2020-0232